

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki potensi kekayaan akan sumber daya alam, budaya, maupun tradisi. Potensi alam dari Sabang sampai Merauke mempunyai keanekaragaman yang dapat menjadikan berbagai macam daya tarik wisata eksotis. Beberapa wilayah di Indonesia dominan memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi situs warisan budaya (*culture heritage sites*). Daerah dengan status situs warisan budaya sangat rentan terhadap ancaman laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lingkungan. Situs warisan budaya yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata merupakan salah satu upaya perlindungan secara khusus terhadap ancaman yang terjadi serta sebagai pembangunan sektor pariwisata.

Sektor pariwisata pada negara Indonesia menjadi salah satu bidang yang berperan menghasilkan devisa negara terbesar. Selain itu, pariwisata juga berperan pada implementasi pembangunan baik yang dilakukan oleh daerah maupun nasional. Industri pariwisata berkembang pesat dan cepat sehingga menjadi salah satu sektor penunjang ekonomi terbesar berbagai negara di dunia. Adanya industri pariwisata yang melakukan ekspansi dan diversifikasi secara berkelanjutan dapat menumbuhkan ekonomi. Sehingga sektor pariwisata di Indonesia juga mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan pengembangan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengembangan berkelanjutan di

Indonesia dapat melalui perkuatan komunitas lokal, pengembangan ekowisata, dan penguatan identitas kebudayaan. Saat ini, pengembangan pariwisata mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menjadi salah satu program unggulan pemerintah selain menghasilkan devisa negara juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha. (Ramadhani & Madani, 2022)

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2022 hasil devisa sektor pariwisata mencapai US\$4,26 Miliar. Data tersebut dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pariwisata secara nasional dapat meningkatkan ekonomi yang positif. Data devisa negara Indonesia dari tahun 2013 - 2023 pada sektor pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata di Indonesia



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023

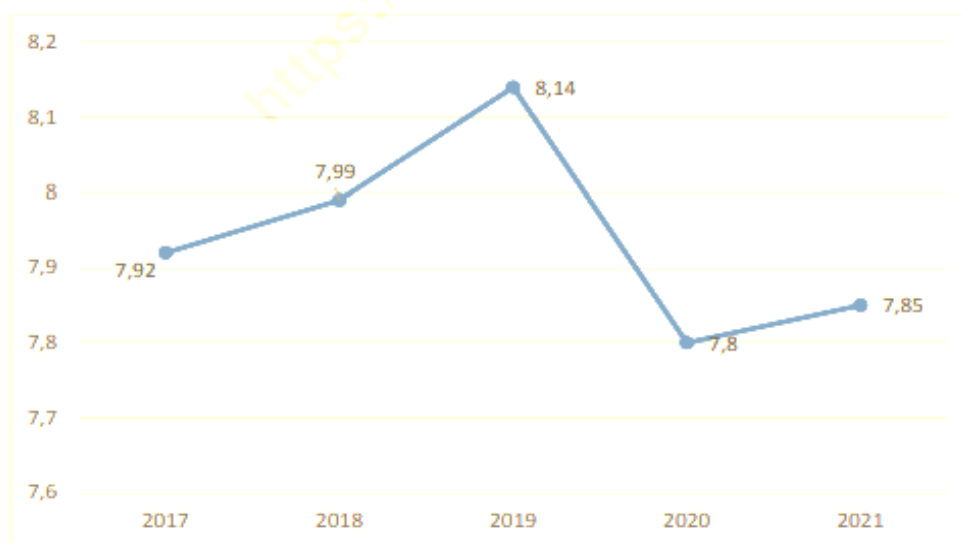
Pada tabel diatas kontribusi devisa sektor pariwisata dari tahun ke tahun meningkat akan tetapi tidak pada masa pandemi *Covid-19*. Kontribusi sektor pariwisata sangat penting untuk meningkatkan ekonomi agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah Republik Indonesia mempunyai peran dalam membentuk regulasi dan kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata pada rencana pembangunan ekonomi. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana pembangunan tersebut yaitu pengembangan destinasi unggulan, melalui perbaikan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di destinasi pariwisata prioritas.

Pariwisata Indonesia berhasil naik ke peringkat 32 dari urutan 195 negara (*World Economy Forum, 2022*). Tidak hanya itu pemerintah Indonesia juga berhasil melampaui target kunjungan wisata pada tahun 2022. Untuk kunjungan wisatawan terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 5,47 juta pada tahun 2022 (*Kemenparekraf, 2022*). Sehingga terdapat kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi melalui pariwisata merupakan salah satu langkah yang dilakukan karena banyak masyarakat yang berpenghasilan melalui adanya pariwisata. Di Indonesia pengembangan pariwisata berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Adanya dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata mendapat perhatian khusus dari pemerintah guna mendukung peningkatan perekonomian negara.

Pemerintah pusat melakukan peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata sehingga pada pemerintah daerah juga mulai memberikan perhatiannya

di sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daerah-daerah yang berlomba-lomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata di daerahnya dan berupaya memperbaiki sarana dan prasarana serta akses menuju lokasi wisata. Salah satu daerah yang memperoleh devisa nya melalui sektor pariwisata adalah Jawa Tengah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki cukup banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jawa Tengah
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2017-2021

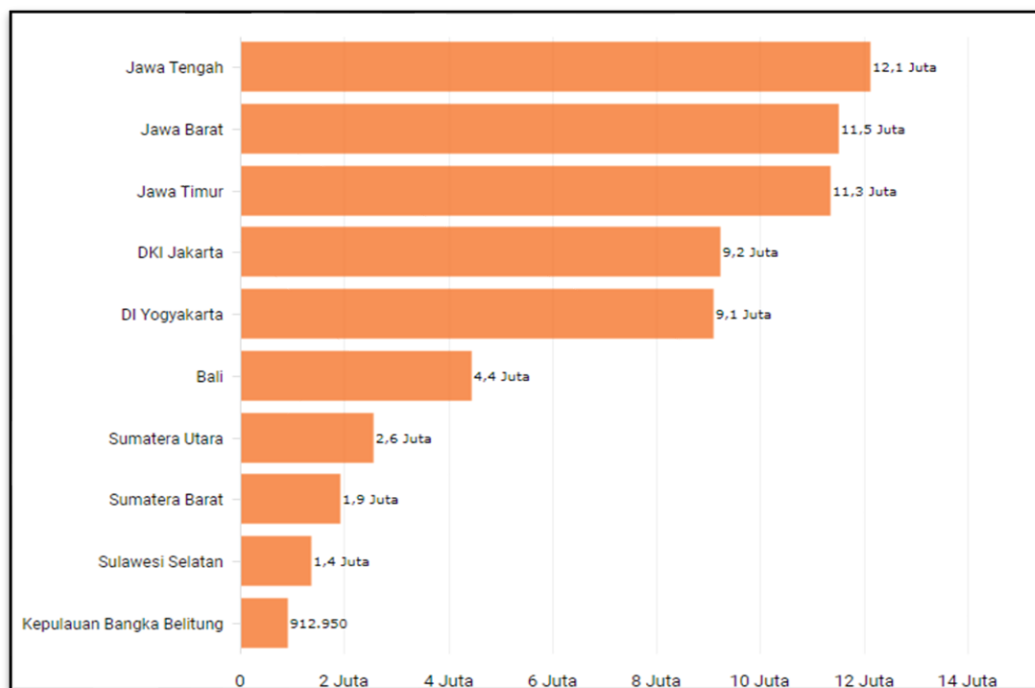


Sumber: BPS Provinsi Jateng 2021

Berdasarkan data BPS (2021) Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah semakin meningkat dari 7,92 persen pada tahun 2017 menjadi 8,14 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terjadi penurunan menjadi 7,8 persen akibat berbagai kebijakan pembatasan di sektor pariwisata untuk mengantisipasi lonjakan pandemi *Covid-*

19. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah, pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah sedikit meningkat menjadi 7,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 1. 2 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pada 10 Provinsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020

Kemendparekraf menyatakan bahwa jumlah pengunjung objek wisata di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 72,26 juta pengunjung. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pengunjung terbanyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Tercatat, jumlah pengunjung objek wisata di Jawa Tengah mencapai 12,1 juta pengunjung. Jumlah itu setara dengan 16,75% dari total pengunjung objek wisata di Indonesia pada 2020. Salah satu

Kabupaten di Jawa Tengah yang juga memperoleh Sebagian besar pendapatannya melalui sektor pariwisata adalah Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara $7^{\circ} 32'$ - $8^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 41'$ - $111^{\circ} 18'$ Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kabupaten Wonogiri terkenal dengan daerahnya yang gersang, namun demikian kabupaten tersebut memiliki banyak potensi wisata baik wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner serta desa wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penghasilan yang menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri setelah sektor pertanian. Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang masuk kedalam karisidenan Surakarta, kabupaten ini menjadi satu – satunya daerah yang ada di wilayah karisidenan yang memiliki bibir pantai dalam runtutan pantai selatan. Tidak hanya mengenai pantai, Kabupaten Wonogiri juga mempunyai potensi alam yang indah dan unik seperti goa, karst, gugusan gunung perbukitan serta bentangan hutan.

Kontribusi signifikan sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah adalah harapan yang ingin dicapai oleh daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk tiga kabupaten dengan kepemilikan keunikan bentang alam karst. Tiga kabupaten tersebut yaitu Kab. Wonogiri, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Pacitan, yang memiliki potensi besar untuk wisata pantai dan gua karena lanskap karstnya. Data statistik kepariwisataan menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri dalam posisi tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga tersebut. Selama tahun 2022 jumlah

wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan sebanyak 1.500.000 orang menyumbang Rp 11.200.000.000,00 terhadap PAD pada sektor kepariwisataan. Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah wisatawan 3.106.772 orang menyumbangkan Rp 20.873.577.199,00 terhadap PAD Tahun 2022 pada sektor kepariwisataan. Adapun Kabupaten Wonogiri dengan jumlah wisatawan 236.052 orang menyumbangkan Rp 2.739.520.400,00 terhadap PAD tahun 2022. Pemda Kabupaten Wonogiri telah berusaha mengembangkan kepariwisataannya melalui desain strategi pembangunan pariwisata daerah. Desain strategi pembangunan tersebut tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2028.

Terdapat regulasi terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri, akan tetapi belum diterapkan secara spesifik. Sesuai dengan tujuan maupun kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri dengan adanya potensi pariwisata, maka perlu dikembangkan dengan melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Pengalaman dari berbagai daerah tujuan untuk wisata di berbagai negara menunjukkan bahwa untuk jangka panjang memerlukan pendekatan terencana. Pendekatan terencana dalam konteks pengembangan pariwisata akan memberikan manfaat secara berkelanjutan tanpa mengakibatkan timbulnya permasalahan, dan terpenting kepuasan wisatawan dapat terpenuhi. Pengembangan yang dilaksanakan menggunakan cara perencanaan yang baik dapat memberi manfaat ekonomis untuk jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang belum tentu berjalan baik, akan terjadi masalah lingkungan dan sosial budaya maupun mutu produk yang kurang bagus. Pengembangan pariwisata perlu pembangunan

fasilitas secara terstruktur. Sehingga dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan pariwisata ialah primadona dalam pertumbuhan ekonomi nasional. (Nugroho et al., n.d., 2015)

Strategi untuk mengembangkan pariwisata telah didukung oleh pemerintah Indonesia melalui adanya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa objek wisata yang berada di Indonesia dapat meningkatkan peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan yang utama yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, dapat meningkatkan rasa peduli lingkungan untuk melestarikan alam dan budaya. Hal ini, pengembangan pariwisata harus memperhatikan ketentuan pasal 12 sampai pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menyatakan pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan seperti keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat (UU Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2009). Hal tersebut memfokuskan bahwa pengembangan wisata harus memperhatikan sudut pandang seperti dilihat dari daya dukung lingkungan pada objek wisata tersebut. Sehingga pada akhirnya kebutuhan pariwisata dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas fisik lingkungan pada kawasan tersebut serta dapat mendorong kearah pariwisata yang berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mencapai kesejahteraan rakyat. Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tanpa kemiskinan. Untuk mencapai target tersebut baik desa maupun kota harus terlepas dari angka kemiskinan. Pada tingkat desa dalam mengatasi kemiskinan salah satu sektor yang bergerak yaitu pariwisata pada desa atau program desa wisata. Program desa wisata merupakan model pengembangan pariwisata di Indonesia dengan sistem melestarikan sumber daya yang ada. Selain itu, pariwisata diselenggarakan secara sistematis, terencana, runtut, terpadu dan holistik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang didukung oleh sarana promosi seperti fasilitas yang mudah, pelayanan prima, dan peraturan. Komitmen yang tinggi terhadap perencanaan berkelanjutan dan pemeliharaan yang tepat merupakan ciri dari banyak destinasi yang layak. (Martitah et al., n.d., 2022)

Menurut peraturan Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif No. 1 Tahun 2023, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Kemunculan desa wisata merupakan salah satu bagian pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan desa wisata cenderung menggali potensi desa dengan memanfaatkan kapasitas elemen desa yang ada (diwakili dan dikelola oleh warga desa) untuk berperan sebagai produk wisata. menyampaikan dan mencapai tujuan. Beragamnya kebutuhan wisata baik dari segi

daya tarik potensi serta fasilitas pendukung lainnya. Kawasan perdesaan yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata adalah kawasan yang mempunyai kondisi ekonomi, alam, sosial dan budaya, lingkungan fisik yang baik, serta memiliki ciri khas non-perkotaan, sekaligus memiliki ciri kehidupan tradisional dan unik.

Perkembangan pariwisata tidak hanya pada kota besar akan tetapi sudah mulai merambah ke wilayah desa-desa. Perkembangan wisata di desa dengan cara adanya desa-desa yang menggali dan mengembangkan potensi wisata dengan pengelolaan yang baik dan dapat menambah pendapatan asli desa. Bahkan terdapat desa yang tidak mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Desa tersebut tidak menerima dan mendapatkan dana desa karena telah menjadi desa mandiri dengan mengelola potensi dan mengembangkan menjadi desa wisata. Sehingga adanya desa wisata menjadikan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan serta melestarikan budaya yang ada.

Salah satu provinsi yang mengatur tentang pemberdayaan desa wisata yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 terkait pemberdayaan desa wisata. Hal tersebut menjadi dasar bagi Kota/Kabupaten untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan konsep desa wisata. Seperti Kabupaten Wonogiri mengembangkan desa wisata dan memiliki beberapa desa wisata yang cukup terkenal. Desa wisata tersebut diantaranya Kecamatan Paranggupito dengan adanya Desa wisata Paranggupito, Kecamatan Batuwarno dengan adanya Desa Wisata Sumberejo, Selanjutnya untuk Kecamatan Manyaran terdapat dua desa wisata yaitu Desa

Wisata Kepuhsari serta Desa Wisata Karanglor, untuk Kecamatan Wonogiri terdapat Desa Wisata Sendang, dan Kecamatan Bulukerto yaitu dengan adanya Desa Wisata Conto. Diantara banyaknya desa wisata di Kabupaten Wonogiri terdapat dua desa wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yakni Desa Wisata Conto dan Desa Wisata Paranggupito. Namun demikian, dari segi pengelolaannya Desa Wisata Conto jauh lebih unggul daripada Desa Wisata Paranggupito, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang datang. Kendala-kendala dalam pembangunan desa wisata di Kabupaten Wonogiri yaitu kurangnya partisipasi sumber daya manusia dalam pengembangan baik dari perencanaan sampai pengawasan, kurangnya infrastruktur jalan menuju destinasi wisata pada desa wisata, dan kurangnya kegiatan promosi terkait daya tarik desa wisata masih sangat kurang. (Martitah et al. n.d., 2022)

Desa Wisata Conto merupakan pengembangan pariwisata pada tingkat desa di Wonogiri. Desa Conto merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dan budaya di Kabupaten Wonogiri. Melihat potensi budaya masyarakat dan alam maka pengembangan wisata desa bermula pada dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) pada Tahun 2017. Selain itu, motivasi pengembangan pariwisata sampai destinasi wisata juga berawal dari banyaknya masyarakat yang merantau akan tetapi sebenarnya desa tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat menciptakan sebuah pekerjaan. Awal mula adanya desa wisata masih minim pengunjung dan kurangnya branding secara meluas. Setahun berjalan sudah banyak pengunjung baik dari luar kota maupun provinsi.

Pada tahun 2022 Desa Wisata Conto meraih predikat desa wisata terbaik di Jawa Tengah kategori Sapta Pesona dan *Cleanliness, Healty, Safety, & Environment Sustainability* (CHSE). Pada predikat tersebut Desa Wisata Conto berhasil mengungguli 27 desa wisata di Jawa Tengah. Dan pada tahun 2023 Desa Wisata Conto mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang berhasil meraih juara harapan dalam kategori desa berkembang. Pada penghargaan ADWI Tahun 2023 di ikuti 4.573 dan Desa Wisata Conto masuk dalam 75 Desa Pemenang ADWI.

Desa Conto memiliki beberapa potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ikon wisata, secara umum terdapat 13 titik potensi yang sudah dipetakan tersebar di 5 dusun. Beberapa di antaranya sudah dikembangkan dan dikelola, namun sebagian diantaranya masih belum dikelola. Beberapa potensi tersebut adalah Goa Resi, Bukit Gendol, Air Terjun Grenjengan, Soko Langit, Kebun Sayur Banteng, Air Terjun Kresek, Air Terjun Ngliwungan, Hutan Pinus Dosini, Ringin Apak Crenggeng, Hutan Pinus Bekokek, dan Agrowisata Semilir. Pengembangan potensi di desa conto dilakukan dengan menggunakan acuan dari Rencana Pengembangan Desa Wisata secara bertahap baik itu untuk jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang yang telah disusun oleh tim Pokdarwis. Dalam pengembangannya juga tidak lepas dari dasar-dasar pengembangan wisata “Sapta Pesona” yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah-Tamah dan Kenangan. Potensi tersebut perlu pengembangan untuk dijadikan destinasi wisata yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah.

Destinasi wisata merupakan sebuah daerah tujuan untuk pariwisata Daerah tujuan pariwisata adalah suatu wilayah geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif dimana daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat saling berhubungan dan melengkapi terwujudnya pariwisata. Pada desa wisata Conto banyak potensi yang perlu dikembangkan menjadi destinasi wisata untuk menaikkan daya tarik wisatawan akan tetapi terdapat beberapa kendala. Sedangkan kendala dalam pengembangan destinasi wisata yaitu kurangnya dana untuk mengembangkan potensi sehingga perlu kerjasama dari pihak lain seperti swasta. (Martitah et al., n.d., 2022)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lylik (2020:60) perlu adanya upaya sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto. Salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata yang harus terlibat yaitu pihak swasta. Pihak swasta dapat melakukan pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai. Sehingga diperlukan adanya kerjasama dalam membangun destinasi wisata. *Partnership* antara pemerintah desa dengan pihak swasta atau investor diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berlandaskan Perpres No 38 Tahun 2015 terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha menguatkan bahwa pemdes dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. *Partnership* tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan memberikan sebuah manfaat dan dampak positif. Kemitraan pemerintah dengan swasta disebut juga dengan *Public Private Partnership*. Persoalan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) bukanlah hal yang mudah

terkhususnya pada proses implementasi pengembangan destinasi wisata. (Suranny, 2020)

Pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto yang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu pembangunan wisata pada potensi Goa Resi. Pembangunan destinasi wisata Goa Resi bekerjasama dengan CV. Ambar Sari yang berawal pada tahun 2021. PPP tersebut, telah memiliki landasan kemitraan yaitu adanya MOU yang mengatur tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah desa yang dikelola oleh swasta. Dalam kerjasama tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan ke destinasi maupun membangun fasilitas di sekitar destinasi. Selain itu, wilayah Desa Conto yang berbentuk perbukitan dan tidak datar maka ancaman yang terjadi ketika hujan yaitu tanah longsor di jalan. Sehingga, perlu kerjasama untuk memperbaiki jalan yang rusak karena anggaran dana desa tidak turun secara cepat. Adanya pengembangan destinasi tersebut juga menghasilkan pendapatan asli desa yang semula tidak ada penghasilan apapun dari potensi goa tersebut. Sehingga adanya kerjasama sangat membantu menjadi desa yang berkembang dan berkelanjutan.

Gambar 1. 3 Goa Resi sebelum adanya pengembangan



Sumber: Notobudiyanto.blogspot.com Tahun 2015

Gambar 1. 4 Wajah baru pengembangan destinasi wisata Goa Resi

Resi



Sumber : Instagram Goa Resi Tahun 2023

Public Private Patnership pada pengembangan destinasi wisata dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya kendala ataupun permasalahan. Terdapat permasalahan dalam kemitraan yaitu pada awal terjadinya kemitraan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah dan swasta. Banyak masyarakat yang mengira itu hanya ajang bisnis dan tidak menghasilkan apa-apa. Masyarakat masih beranggapan bahwa keuntungan hanya untuk swasta. Sehingga perlu pembuktian kepada masyarakat bahwa kerjasama pemerintah desa dengan swasta dapat meningkatkan perekonomian di desa. Di Kabupaten Wonogiri, meski terdapat beberapa masyarakat yang berminat mengembangkan desa wisata, namun belum banyak yang terpikir untuk ikut mendukung program ini. Masih sulit meyakinkan masyarakat daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, pemangku kepentingan kurang melibatkan masyarakat secara mendalam dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. (Martitah et al., n.d., 2022)

Permasalahan lain yaitu adanya perbedaan pendapat dalam kerjasama yang menghambat implementasi kerjasama. Terkadang masih terdapat perbedaan pendapat maupun persepsi antara pemerintah desa dengan swasta terkait perencanaan bentuk pengembangan fasilitas maupun perbaikan jalan. Sehingga perlu adanya persamaan persepsi pada kerjasama tersebut. Solusinya harus diadakan rapat dalam lingkup kecil dalam menangani permasalahan. Dikutip dari Radar Solo Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf mengatakan pendapat “bahwa kerjasama pada pengelolaan pariwisata Desa Wisata Conto tidak mudah dilakukan karena dalam prosesnya pasti terdapat tarik-menarik kepentingan dan perbedaan pendapat”. (Cahyono, 2023)

Terakhir pada pengembangan wisata yang bekerjasama dengan swasta pada Desa Wisata di daerah Wonogiri terdapat kendala berupa belum adanya regulasi yang mengatur pengembangan tersebut. Regulasi tersebut terutama payung hukum dari pemerintah daerah yaitu pemkab dalam pengaturan terkait masuknya investor dan bentuk kemitraan. Hal ini seperti hasil penelitian dari Martitah pada tahun 2022 terkait pengembangan desa wisata di Kabupaten Wonogiri. Disebutkan hasil penelitian yaitu terdapat kendala dalam pengembangan desa wisata di Wonogiri terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan swasta. Sehingga perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah kabupaten terkait dengan regulasi *Public Private Patnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada desa wisata. (Martitah et al. n.d., 2022)

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yaitu Analisis *Public Private Partnership* Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Nepal Van Java oleh Yurika Santi, Hartuti Purnaweni, dkk tahun 2023 menegaskan bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan. Terutama pada peran swasta sebagai modal untuk pengembangan pariwisata. Dalam proses pelaksanaan *public private partnership* penting menerapkan prinsip keberhasilan kemitraan baik prinsip komitmen, transparansi, negosiasi, maupun pengawasan. Adanya prinsip tersebut akan menjadikan pondasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut memberikan efektivitas dalam memperoleh pendapatan retribusi pariwisata. Pemerintah dan swasta bekerja sama untuk membangun fasilitas di destinasi wisata, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengunjung, dan mengefisienkan anggaran pengembangan pariwisata. (Santi et al., n.d., 2023)

Penelitian tersebut merupakan salah satu pentingnya *Public Private Partnership* diteliti untuk mengetahui berbagai proses didalam kemitraan melalui beberapa prinsip kemitraan. Sehingga dalam penelitian ini, akan memperdalam terkait prinsip – prinsip *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto. Adanya kerjasama tersebut apakah sudah menerapkan prinsip kemitraan secara optimal. Berdasarkan latar belakang dengan pokok pikiran tersebut diperlukan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata dengan harapan dapat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa maju melalui peningkatan ekonomi pada sektor wisata. Maka dari itu, penulis akan melaksanakan penelitian

dan analisis terkait “**Analisis *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri**”. Penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan terkait prinsip – prinsip yang digunakan dalam *Public Private Partnership* dan faktor keberhasilan kerjasama menggunakan sebuah teori *Public Private Partnership*.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Wonogiri kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat dengan pihak pemerintah maupun swasta masih rendah.
2. Terjadinya miss komunikasi dan perbedaan pendapat maupun persepsi antara pemerintah desa dengan swasta terkait bentuk pengembangan destinasi baik dari potensi yang ada ataupun fasilitasnya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah dalam identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri?

- 2) Bagaimana faktor keberhasilan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini maka memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.
- 2) Untuk mengetahui faktor keberhasilan adanya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna termasuk dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Suatu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam sebuah pengembangan destinasi wisata terkhususnya pada desa wisata. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kajian literatur untuk melakukan penelitian yang sama dalam lingkup yang berbeda, seluas-luasnya, dan lebih dalam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah kajian literatur pada universitas terkait dengan teori *public private partnership* yang digunakan dalam implementasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca secara umum maupun mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Bagi Pemerintah Desa

Untuk menambahkan wawasan pemerintah desa lainnya terkait pentingnya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pengembangan destinasi wisata. Selanjutnya hasilnya dapat menjadi bahan untuk evaluasi dari peran masing masing stakeholder baik pemerintah daerah, pemerintah desa, dan swasta dalam pelaksanaan kebijakannya maupun masukan bentuk kerjasama yang ideal.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi terkait *public private partnership* pada suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dapat menjadikan penambahan pengetahuan masyarakat bahwa pemerintah desa bisa menjadikan desanya lebih maju dan meningkatkan perekonomian desa.

4. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan terkait pengetahuan di dunia pemerintahan dan mendapatkan sebuah pengalaman dari apa yang sudah dilakukan saat penelitian. Serta melaksanakan ilmu atau materi

yang didapat saat perkuliahan dalam mengatasi sebuah masalah yaitu pengembangan wisata.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Public Private Partnership</i> Dalam Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India Muhammad Tang Abdullah. (2020)	Untuk mengetahui bagaimana <i>public private partnership</i> secara konsep dan untuk mengetahui pengalaman negara mempraktikkan sebuah konsep tersebut.	Kualitatif Teori bentuk hubungan kemitraan oleh Savas tahun 1994 ada sepuluh model <i>public private partnership</i> .	Hasil penelitian ini mengetahui bahwa <i>public private partnership</i> sangat terkait dengan konsep <i>new public management dan governance</i> . Dalam prakteknya di Indonesia dan India sudah menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dampaknya juga nyata karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi warga negara kedua negara tersebut. Disimpulkan pula bahwa di masa mendatang tidak hanya model <i>public private partnership</i> , yang perlu dikembangkan dalam penyediaan pelayanan publik. Model <i>public private and society (community) partnership</i> juga perlu dikembangkan agar penyediaan pelayanan publik menjadi lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

2	<p><i>Public Private Partnership</i></p> <p>Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di PD Parkir Kota Makassar</p> <p>Yustika Ayu, Fatmawati, dan Nasrulhaq. (2021)</p>	<p>Untuk mengetahui pengelolaan parkir melalui <i>public private partnership</i> dalam implementasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di PD Parkir Kota Makassar.</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Teori karakteristik kemitraan menurut Taket and White dalam Fatmawati (2014) dan pola interaksi kemitraan Fatmawati (2014)</p>	<p><i>Public private partnership</i> Dalam Pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di PD Parkir Kota Makassar dilihat dari karakteristik kemitraan (1) adanya perjanjian tertulis dalam menentukan kemitraan, MoU pemerintah dengan PT. Kinarya Terbaik Indonesia. (2) adanya tujuan untuk meningkatkan PAD (3) adanya pembagian tanggung jawab atas resiko (4) Sumber daya, biaya dan manfaat, fasilitas seluruhnya dari pihak swasta dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Kemudian dilihat dari Pola interaksi kemitraan yaitu (1) pengaturan, kontrol dan evaluasi dilakukan pemerintah secara mandiri (2) ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.</p>
3	<p><i>Public-Private Partnership</i></p> <p>Dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove</p> <p>Dhani Akbar dan Khairul Ikhsan. (2019)</p>	<p>Untuk menganalisis peran <i>private sector</i> (swasta) dan <i>smart community</i> (kelompok masyarakat) dalam mengoptimalkan potensi wisata mangrove di daerah pesisir.</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Teori tipe kemitraan adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (<i>Add, Operate and Transfer-AOT</i>).</p>	<p>Tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (<i>Add, Operate and Transfer-AOT</i>). Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, maka prinsip yang digunakan dalam</p>

				<p>kemitraan ini adalah prinsip pemberdayaan (<i>empowering</i>) dimana kelompok masyarakat tidak sedikit memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun, terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses pelaksanaan wisata Bintang Mangrove. Kemitraan antara PT Bintang Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan public-private partnership yaitu kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dimana menggunakan desain kemitraan <i>collaborative dynamics</i> dimana lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk pengembangan inovasi, kreativitas untuk industri wisata kreatif ini.</p>
4	<i>Study of Public Private</i>	Untuk mengetahui	Kualitatif	Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat

	<p><i>Partnership Urgency in Palembang City</i></p> <p>Helda Fitriani. (2023)</p>	<p>urgensi kerjasama pemerintah dengan swasta pada Kota Palembang untuk mewujudkan “Palembang <i>Champions Program</i>”.</p>		<p>perlu dikembangkan untuk membuat penyampaian layanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah diakses. Model jaringan kemitraan yang berbeda perlu dikembangkan tidak hanya untuk memprediksi permintaan akan layanan publik, tetapi juga untuk memprediksi dominasi pemerintah dan pasar dalam penyediaan barang dan layanan publik. Model jaringan kemitraan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, jika Kota Palembang mengimplementasikan kemitraan publik-swasta ini, semua masalah di atas harus ditangani.</p>
5	<p>Implementasi <i>Public Private Partnership</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara</p>	<p>Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan <i>public private partnership</i> dalam pengembangan</p>	<p>Kualitatif Teori dari Casanova (dalam Setiawan dan Sukma F, 2012) tentang</p>	<p>Keberhasilan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja yang dilihat dari <i>Equity</i> (keadilan), <i>Effectiveness</i></p>

	Muh. Hidayat Djabbari, Alwi, dan Saddam Husain Tamrin. (2021)	sektor pariwisata.	pedoman pengukuran keberhasilan suatu kemitraan.	(efektivitas), <i>efficiency</i> (efisien), dan <i>Exportability</i> (tingkah laku) menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata, kerjasama tersebut dilaksanakan dengan pembuatan kesepakatan-kesepakatan didalam MoU atau Perjanjian Kerjasama antara pemerintah (publik) dan pengelola/pemilik objek wisata (swasta). Kerjasama tersebut memberikan efektivitas dalam memperoleh pendapatan retribusi pariwisata serta kerjasama ini menghasilkan pengelolaan pariwisata dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dan penggunaan anggaran yang efisien dalam melakukan pembangunan pariwisata.
6	Analisis <i>Public-Private Partnership</i> Dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan Di Kabupaten Magetan Nina Galih Pratiwi dan	Untuk menjelaskan fungsi dan peran pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Obyek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten	Kualitatif Teori jenis <i>inter government al networks</i> , sesuai urutan derajat <i>networks-</i> nya yaitu <i>information networks, developmen</i>	Kemitraan antara sesama instansi pemerintah sudah sampai pada derajat <i>action networks</i> atau pelaksanaan. Kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha pariwisata masih sangat kurang. Bahkan kemitraan ini baru menyentuh tahap <i>information networks</i> .

	Hardi Warsono. (2018)	Magetan serta menjelaskan kemitraan dalam pengembangan Obyek Wisata Sarangan	<i>tal networks, outreach networks, action networks.</i>	Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan ini juga sudah pada tahap <i>action networks</i> atau pelaksanaan. Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengembangan belum berjalan optimal, namun salah satu bentuk kemitraan yang sudah dijalin adalah dengan Telkomsel dan PHRI.
7	Implementasi <i>Public-Private-Partnership</i> (PPP) Dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Perkotaan Christin Dameria dan Petrus Natalivan Indradjati. (2022)	Untuk mengetahui bagaimana PPP pada program pelestarian kawasan cagar budaya perkotaan.	Kualitatif	Terdapat minimal tiga syarat agar implementasi kemitraan PPP sesuai dengan konteks pelestarian kawasan cagar budaya perkotaan, terutama di Indonesia. Pertama, sektor publik harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan komunikatif. Kedua, sektor swasta harus mampu menempatkan sektor ketiga bukan sekadar konsumen, tetapi sebagai penyedia dan pemelihara. Ketiga, sektor ketiga harus memiliki posisi jelas dalam kemitraan PPP dan perlu didampingi agar mampu mengelola keberlanjutan program-program pelestarian ketika masa kerja swasta selesai.

				Dibutuhkan model-model kemitraan PPP yang sesuai dengan tipologi kawasan cagar budaya dan karakter pemangku kepentingan. Dengan demikian, meskipun kemitraan PPP melibatkan sektor swasta yang berorientasi ekonomi, tetapi tetap memiliki pendekatan budaya dan unsur partisipatif karena memberi ruang untuk konteks, keberlanjutan nilai signifikansi budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
8	<p><i>Public Private Partnership</i> Dalam Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas (PKTKP) Berbasis Pemagangan Dalam Negeri Di Provinsi Lampung</p> <p>Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, dan Asmiati. (2022)</p>	Untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri dan mengidentifikasi faktor-faktornya mendukung dan menghambat pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di Provinsi Lampung.	Kualitatif Teori tentang lima aspek tolak ukur keberhasilan penerapan PPP oleh Kurniawan Setianto, 2009.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas (PKTKP) berbasis pemagangan dalam negeri di Provinsi Lampung cukup efektif. Dilihat dari aspek kebijakan dapat dikatakan efektif karena tujuannya diselenggarakannya program ini sesuai dengan tujuan pemerintah-swasta kemitraan yang bermanfaat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga memberikan manfaat

				<p>dari perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Kantor. Pada aspek sumber daya, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dalam negeri ini</p> <p>program pemagangan belum maksimal dalam mencapai target/hasil yang diinginkan</p> <p>bahwa aspek sumber daya pada fokus ini dapat dikatakan kurang efektif. Dalam komunikasi yang berlangsung cukup baik, hal ini terlihat dari proses lobi untuk mencapai target penyerapan peserta, meskipun komunikasi dalam proses sosialisasi selama perusahaan perekrutan belum mencapai target.</p>
9	<p><i>Public-private partnerships in smart cities: A critical survey and research agenda</i></p> <p>Xiangyu Quan dan Marte C.W. Solheim. (2022)</p>	<p>Untuk menganalisis public private partnership dalam pengembangan kota pintar.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian dengan fokus pada konteks dan empat tema utama: lokalitas, kompleksitas pemangku kepentingan, ketegangan, dan pembangunan kepercayaan. Keempat tema ini menjadi dasar model yang usulkan dan menjelaskan elemen-elemen utama yang mempengaruhi PPP</p> <p>pembentukan program kota pintar. Bahwa kemitraan yang terlibat</p>

				<p>dalam kota pintar perlu ditingkatkan penyempurnaan untuk memungkinkan transparansi dan keterlibatan dalam berbagai konteks. Tema kunci yang muncul dari analisis ini adalah kelokalan, yang mana menunjukkan pentingnya konteks dan menyarankan hal itu, sejalan atau tidak solusi kota pintar yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Kapan teknologi terstandarisasi memenuhi kebutuhan lokal, kota yang kompleks dan tidak merata infrastruktur pasti mengarah pada berbagai solusi seiring dengan perkembangan teknologi disesuaikan dengan konteks lokal.</p>
10	<p><i>Public-private partnership in the Portuguese health sector</i></p> <p>Nuno José Pinho Rodrigues dan Joao M.S. Carvalho. (2023)</p>	<p>Untuk menganalisis periode antara tahun 2012 dan 2021, hasil ekonomi dan keuangan (<i>value for-money</i>) dari model PPP, dibandingkan dengan rumah sakit manajemen pemerintah.</p>	Mixed Method	<p>Hasil penelitian yaitu model PPP yang diterapkan pada sektor kesehatan tampaknya memberikan manfaat, tidak hanya dalam hal hasil ekonomi dan keuangan tetapi juga dalam hal kualitas layanan kesehatan. penyediaan layanan. Meskipun nilai manfaat uang (<i>value-for-money</i>) yang dihasilkan oleh model PPP, nilai tersebut semakin rendah biaya operasional dan</p>

				<p>kinerja yang unggul dibandingkan dengan <i>Public Management Hospitals</i> yang dimiliki pemerintah secara permanen memilih untuk beralih dari model KPS ke model PMH. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Model manajemen rumah sakit malah dipandang sebagai instrumen politik yang terinstrumentasi dibandingkan sebuah alat manajemen yang dapat menghasilkan penghematan bagi wajib pajak.</p>
11	<p><i>India could harness public-private partnerships to achieve malaria elimination</i></p> <p>Manju Rahu dan Amit Sharma. (2022)</p>	<p>Untuk mengetahui pentingnya PPP dalam mengurangi Malaria di India</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yaitu bahwa suatu PPP sangat membantu dalam mengurangi malaria, akan tetapi di India belum terdapat kerjasama pihak swasta atau non pemerintah dengan pemerintah. Sehingga integrasi dan konvergensi harus dilakukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi, metode, alat, strategi, dan aktivitas mungkin diperlukan untuk mendorong hal tersebut negara menuju eliminasi. Metode yang mengganggu seperti beberapa asosiasi publik-swasta dan pelanggaran</p>

				diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan antara kedua sektor tersebut.
12	<i>Public–Private-Partnerships In Nigeria: Public And Private Sector Perceptions About Critical Success Factors</i> Martin Oloruntobi Dada dan Michael Oladokun. (2015)	Untuk menilai sejumlah faktor yang dianggap penting bagi keberhasilan atau kegagalan PPP dan membandingkan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat dan sektor swasta.	Kuantitatif	Lima faktor penentu keberhasilan dengan sub-faktornya yang digunakan sebelumnya pekerjaan dinilai dan diselidiki di lingkungan penelitian. Dari lima (<i>critical success factors</i>) CSF, kelayakan ekonomi menduduki peringkat paling penting bagi keberhasilan proyek PPP dan alokasi risiko yang tepat melalui pengaturan kontrak yang andal, keuangan yang bersih, lingkungan investasi yang menguntungkan, dan pemegang konsesi yang andal dengan teknis yang memadai pada kekuatan masing-masing. Ditemukan juga bahwa tidak ada korelasi yang signifikan persepsi sektor publik dan swasta mengenai pentingnya CSF. Hal ini pemangku kepentingan harus mengambil langkah-langkah untuk menutup kesenjangan persepsi seperti merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan untuk PPP di Nigeria.
13	<i>Policy overview of the</i>	Untuk mengetahui	Kualitatif	Sejauh mana nutrisi diintegrasikan ke dalam

	<p><i>multisectoral nutrition planning process: The progress, challenges, and lessons learned from Burkina Faso</i></p> <p>Ousmane Ouedraogo, Maimouna Halidou Doudou, dkk (2019)</p>	<p>sebuah koordinasi multisektor dalam pelaksanaan nutrisi di Burkina Faso.</p>		<p>kebijakan pembangunan bervariasi dari satu sektor ke sektor lainnya. Sejak 2014, Burkina Faso telah memulai perencanaan gizi melalui pendekatan multisektoral yang melibatkan enam sektor. Ini proses diimplementasikan dalam tiga tahap utama. Kemajuan meliputi revisi kebijakan gizi nasional menuju multisektoral perspektif, perumusan konsensual dan rencana strategis gizi multisektoral berkualitas, penciptaan garis anggaran gizi, dan pembentukan teknis gizi sekretariat.</p>
14	<p><i>Fifty shades of partnerships: a governance typology for public private engagement in the nutrition sector</i></p> <p>Dori Patay, Rob Ralston, Aliyah Palu, dkk. (2023)</p>	<p>Untuk mengetahui berbagai bentuk keterlibatan dengan industri makanan dalam menanggulangi ya penyakit tidak menular yang berhubungan dengan pola makan.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yaitu Tipologi Tata Kelola Keterlibatan Pemerintah dan Swasta di Sektor Gizi berupaya memberikan informasi pembuat kebijakan gizi tingkat nasional tentang praktik keterlibatan yang baik dengan pelaku industri makanan dan pelengkapya alat penilaian risiko yang ada. Tipologi ini berpotensi memberikan masukan bagi pengambilan keputusan</p>

				mengenai keterlibatan sektor publik dengan industri lain yang memperoleh keuntungan yaitu menjadi mengerti produk-produk yang merugikan kesehatan manusia dan bumi.
15	<p><i>Potential benefits of public-private partnerships to improve the efficiency of urban wastewater treatment</i></p> <p>Shulei Cheng, Yu Yu, Fanxin Meng, Jiandong Chen, dkk. (2023)</p>	<p>Untuk menganalisis PPP pada program urban wastewater treatment (UWTE)</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini yaitu model kemitraan publik-swasta (PPP) ini bertujuan untuk pembagian yang wajar manfaat dan risiko dalam memberikan pengolahan air limbah dapat meningkatkan UWTE yang tidak diketahui. Evaluasi dampak model PPP terhadap UWTE dengan mengumpulkan data dari 1.303 program. Menggunakan analisis data envelopment dan model regresi Tobit. UWTE secara signifikan lebih tinggi di kota-kota setingkat prefektur. Memperkenalkan model PPP dalam pembangunan dan pengoperasian WTI, khususnya yang memiliki subsidi kesenjangan kelayakan, persaingan pengadaan, operasi yang diprivatisasi, dan non-demonstrasi. Selain itu, dampak PPP terhadap UWTE dibatasi oleh kondisi perekonomian</p>

				tingkat pembangunan, marketisasi, dan kondisi iklim.
--	--	--	--	--

Berdasarkan pada penelitian – penelitian terdahulu terkait dengan penelitian *Public Private Partnership* penelitian pertama oleh Muhammad Tang Abdullah yang berjudul *Public Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India*. Penelitian tersebut menggunakan teori dari Savas (1994) terkait dengan model PPP dalam praktik pelayanan publik. Hasil penelitian ini mengetahui bahwa *public private partnership* sangat terkait dengan konsep *new public management* dan *governance*. Dalam prakteknya di Indonesia dan India sudah merapkannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dampaknya juga nyata karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi warga negara kedua negara tersebut. Disimpulkan pula bahwa di masa mendatang tidak hanya model *public private partnership*, yang perlu dikembangkan dalam penyediaan pelayanan publik. Model *public private and society (community) partnership* juga perlu dikembangkan agar penyediaan pelayanan publik menjadi lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan model juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Pada penelitian penulis akan menggunakan teori untuk analisis *Public Private Partnership* yaitu prinsip-prinsip kerjasama pemerintah dengan swasta oleh Satyanaryana dan Yescombe dalam Kurniadi,

2020. Bahwa terdapat enam prinsip yang harus digunakan dalam kerjasama kedua belah pihak.

1.6.2 Administrasi Publik

Istilah “administrasi” berasal dari kata Yunani “*administrare*” yang berarti memenuhi, melayani, serta membantu. Dalam bahasa Inggris, kata “*administration*” berasal dari kata Yunani “administrasi” yang berarti intensif dan “*ministrare*” yang berarti melayani. Dapat disimpulkan secara etimologis, bahwa administrasi adalah melayani dengan tertib dan sempurna. Dalam arti sempit, administrasi mengacu pada pekerjaan kantor atau tugas-tugas administratif, yang meliputi urusan persuratan, dokumentasi, pendaftaran, dan kearsipan. Administrasi publik merupakan salah satu cabang administrasi umum yang mempunyai cakupan lebih luas, termasuk ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi, mulai dari organisasi nasional hingga tingkat internasional dari pendirian, digerakkan, dan dikelola. Administrasi publik juga merupakan salah satu cabang ilmu politik yang mempelajari tentang penentuan keputusan pemerintah dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memahami administrasi publik sebagai ilmu yang lahir dari kedua ilmu tersebut, administrasi publik memerlukan dua macam ketentuan jika ingin memahaminya. Pertama-tama, seseorang memerlukan semua pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen umum. Kedua, seseorang harus menyadari bahwa banyak aspek administratif yang mempengaruhi operasional nasional muncul dalam kerangka politik. (Keban, 2008:10)

Administrasi publik menurut para ahli yaitu Woodrow Wilson Administrasi publik adalah praktik hukum yang rinci dan sistematis. Setiap penerapan hukum adalah tindakan administrasi. Menurut Harold F. Gortner Administrasi Publik melibatkan koordinasi dari semua kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk implementasi kebijakan publik. Dan W.F. Willoughby berpendapat bahwa dalam arti luas administrasi publik menunjukkan pekerjaan yang terlibat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan-legislatif, kekuasaan yudikatif dan eksekutif, serta urusan administrasi pemerintahan. Dalam arti sempit: operasi cabang administratif saja.

Cakupan dan ruang lingkup administrasi publik dapat menjadi sangat kompleks, tergantung pada kebutuhan yang berkembang dan dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan materi administrasi publik pada suatu negara adalah dengan melihat jenis lembaga kementerian dan non-kementerian di suatu negara atau wilayah. Hal ini sama dengan pendapat ahli yaitu Chandler dan Plano pada tahun 1988 bahwa jika suatu keadaan interaksi orang - orang menjadi semakin kompleks dalam permasalahannya maka pemerintah juga akan melakukan pelayanan atau administrasi publik semakin kompleks. Ruang lingkup yang dinamis ini dapat dikaji dari berbagai literatur terkhususnya buku terkait administrasi publik. Adanya ruang lingkup atau cakupan administrasi menurut Nicholas Henry pada tahun 1995 membagi beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur selain dari transformasi pengetahuan administrasi

publik itu sendiri seperti organisasi publik yang memiliki asas dasar yang berkenaan dengan perilaku birokrasi dan bentuk organisasi. Selain itu, terdapat manajemen publik yang berhubungan dengan pengetahuan serta sistem manajemen evaluasi produktivitas maupun program, manajemen sumber daya, dan penganggaran publik. Ruang lingkup tersebut dapat diterapkan berkaitan dengan pendekatan terhadap keputusan publik beserta implementasinya, administrasi antar pemerintah, etika birokrasi, dan privatisasi. (Keban, 2008:12)

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu-ilmu yang ada di dunia mengalami perkembangan yang menimbulkan paradigma-paradigma baru sesuai dengan zamannya. Dalam perkembangan paradigma administrasi publik, sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu:

a. Paradigma Dikotomi Politik – Administrasi (1900 – 1926)

Dikotomi Politik – Administrasi merupakan perpisahan persoalan politik dari persoalan administrasi dalam fungsi inti pemerintah, dimana adanya substansi yang meliputi permasalahan-permasalahan politik serta pemerintahan, substansi administrasi pada permasalahan-permasalahan organisasi, penganggaran, dan kepegawaian dalam sistem birokrasi pemerintah (Anwaruddin and Ed 2015). Frank Goodnow dan Leonard White, mengatakan bahwa politik hanya mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan serta berbagai permasalahan lainnya yang akan dituju oleh suatu negara, sedangkan administrasi bersangkutan dengan implementasi kebijaksanaan-

kebijaksanaan tersebut. Locus politik meliputi lembaga legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok kenegaraan. Locus administrasi dengan lembaga eksekutif yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan kebijaksanaan negara (Anwaruddin and Ed 2015).

b. Paradigma Prinsip – Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Dalam prinsip – prinsip administrasi yang ada berkembang sangat pesat dan diterima oleh kalangan industri dan pemerintah, era ini lebih mementingkan fokus dibandingkan dengan lokus. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik bersifat universal yang dapat diimplementasikan ke seluruh tatanan administrasi tanpa adanya kepedulian mengenai misi, fungsi, kebudayaan, ataupun kerangka institusional. Paradigma ini juga lebih berfokus pada POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

c. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Dalam paradigma ini mempertemukan kembalinya keberadaan administrasi sebagai ilmu atau pengetahuan politik dikarenakan administrasi publik berfokus pada memberi bantuan pemegang kekuasaan politik melakukan tugas kenegaraannya secara efektif, efisien, dan administrasi publik juga mempunyai kekuasaan penuh terhadap birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Locus dalam paradigma ini menjadi lingkungan birokrasi pemerintahan.

d. Paradigma Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956 – 1970)

Paradigma ini lebih terpenting kepada fokus dibandingkan lokus, lokus hanyalah bukan suatu persyaratan di dalam paradigma ini. Dengan paradigma ini teknik – teknik ilmu / pengetahuan manajemen serta teori organisasi lebih ditingkatkan sebagai cabang dari ilmu administrasi publik. Tetapi di dalam paradigma ini tidak berfokus pada Teknik – Teknik untuk penerapannya pada institusi.

e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 - 1997)

Administrasi pada paradigma ini adalah pembaharuan, lokusnya tidak terbatas dan tidak melulu pada bidang administrasi, akan tetapi mulai berkembang ke arah organisasi. Fokusnya lebih berkembang pada teori administrasi yang mempersoalkan pada bagaimana suatu organisasi dapat berjalan, dapat berpegang teguh pada perilaku organisasi, dan ketepatan keputusan dapat diambil. Dalam paradigma ini administrasi publik lebih berorientasi pada suatu teori maupun teknik administrasi, politik – ekonomi, manajemen modern, dan fokus pada proses pembuatan, metode, serta analisis pengukuran hasil kebijakan publik.

f. Administrasi Publik dikenal sebagai Administrasi Publik Baru atau *Governance*

Paradigma ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk mengorganisasikan / menata, mendesain, menggambarkan, atau mengarahkan organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan serta mewujudkan nilai kemanusiaan secara optimal. Cara tersebut dilakukan

dengan pengembangan dari sistem desentralisasi serta organisasi yang demokratis dalam membutuhkan keikutsertaan masyarakat dan juga memberikan jasa yang merata untuk kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Dalam kriteria sistem pelayanan publik kepada masyarakat jika pelayanan tersebut diterapkan dengan baik akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang tepat sasaran. Perspektif *new publik service* yang baru menuntut pada peran penyelenggara publik / administrator untuk melibatkan masyarakat dalam tugasnya serta melayani masyarakat. (Karyana, 2014)

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut George R Terry dalam (Suprihatanto, 2018:2) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu desain kerja yang dapat dipengaruhi sebagai adanya arahan pada sebuah kelompok dalam suatu organisasi. Manajemen publik adalah suatu hal yang relatif baru, namun berakar dari adanya pendekatan normatif. Wilson menyatakan bahwa ilmu administrasi publik perlu adanya perubahan yang lebih memperhatikan pada dunia bisnis, adanya perbaikan personal dalam tubuh pemerintah, serta adanya aspek organisasi dan metode metode pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin luas.

Wilson menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip dasar yang mendasari adanya administrasi publik yang mewarnai dengan manajemen publik, yaitu meliputi 1) Adanya suatu metode perbandingan yang dilakukan sebagai pengembangan dan metode studi untuk administrasi publik. 2) Adanya pencarian terkait teknik dan prinsip prinsip manajemen yang lebih efektif

sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi administrasi publik. 3) Eksekutif merupakan fungsi utama. 4) Pemerintah berperan sebagai pengatur organisasi. (Perry & Kraemer, 1991: 5-6). Hal tersebut mempengaruhi adanya perkembangan dalam manajemen publik. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana varian manajemen publik dapat dilihat dari adanya paradigma, serta pergeseran paradigma yang terjadi. Menurut Overman menyatakan bahwa manajemen publik adalah suatu bagian ilmu yang mempunyai aspek secara umum dalam suatu organisasi, serta dapat dikaitkan dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan di sisi lain, adanya keuangan, sumber daya manusia, fisik, informasi, dan politik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa manajemen publik ialah rancangan kegiatan dalam sebuah organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dengan bertujuan untuk mencapai visi misi organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi empat yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Berdasarkan Daft, manajemen memiliki beberapa fungsi, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengendalian (*controlling*), dan kepemimpinan (*leading*). Adanya beberapa fungsi dasar dari manajemen, untuk mengetahui tujuan dalam organisasi tercapai atau belum tercapai dibutuhkan sebuah tindakan atau implementasi dari tujuannya (Abdul Choliq, 2011: 36). Sedangkan menurut John F. Mee terdapat fungsi manajemen

seperti *Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling*. Menurut Henry Fayol terdapat 5 fungsi manajemen, antara lain seperti *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*. Fungsi-fungsi manajemen ini memiliki kesamaan mendasar dan harus dilakukan oleh setiap manajer satu per satu untuk memastikan keberhasilan penerapan proses manajemen (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut terlihat di beberapa fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan Berdasarkan pendapat G.R. Terry mengemukakan bahwa perencanaan / *planning* merupakan suatu tindakan menghubungkan dan memilih suatu fakta serta membuat dan menggunakan asumsi yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan kegiatan yang dapat menunjang dalam mencapai tujuan (Purwanto, 2006:45).

b) Pengorganisasian Menurut G.R. Terry bahwa pengorganisasian merupakan: *“The act of establishing effective behavioral relationships between people, so that they can work efficiently and thereby obtain personal satisfaction in carrying out certain tasks in certain environmental conditions in order to achieve certain goals or objectives* (Hasibuan, 2005: 23).” Artinya secara singkat yaitu tindakan yang mengusahakan hubungan antar orang tersebut efektif sehingga dapat bekerjasama dalam suatu tim secara efisien.

c) Penggerakan merupakan suatu kegiatan dalam membuat seluruh anggota organisasi untuk bekerjasama dan bergairah dalam suatu usaha untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana dan pengorganisasian (Purwanto, 2006:58).

d) Pengawasan, menurut pendapat G.R Terry mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam menentukan apa yang harus dicapai, yaitu standar, dimana terdiri dari apa yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan dan perlunya melakukan perbaikan, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Purwanto, 2006:67).

1.6.5 *Public Private Partnership*

Public private partnership atau kemitraan publik badan usaha dapat diterjemahkan sebagai pengaturan kontrak antara sektor swasta dan pemerintah. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam memanfaatkan keterampilan dan kemampuan masing-masing, yang bertujuan untuk melayani masyarakat pada wilayah dimana kolaborasi itu terbentuk. Kemitraan tersebut dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan tertinggi dengan biaya terendah. Meskipun pelaku swasta seringkali mempunyai tanggung jawab utama atas pengelolaan operasional kemitraan yang berkelanjutan, sektor publik tetap memainkan peran pada tingkat pengembangan bisnis dan pengelolaan sehari-hari. Dalam melaksanakan kolaborasi ini, risiko dan potensi dari manfaat dalam penyediaan layanan dan fasilitas akan diidentifikasi dan dibagi antara pemerintah dan sektor swasta. (Kurniadi, 2020:5)

Dalam hubungan kemitraan, masing-masing pihak memiliki peran sebagai berikut:

- a. Dalam kemitraan pemerintah dan swasta atau badan usaha, pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan aturan main, serta memberikan layanan perizinan dan mengembangkan kerja sama antar daerah, sehingga memungkinkan pelaku ekonomi di setiap daerah untuk mengembangkan investasi bersama. Di sisi lain, dari perspektif sektor swasta, kemitraan ini menekankan peran sektor swasta dalam melibatkan sektor terkait (industri, tenaga kerja, dll) dan menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya wilayah tersebut sebagai lokasi investasi, serta karena perlunya transparansi Anda dapat meningkatkan nilai tambah yang tercipta melalui hubungan perizinan dan aktivitas ekonomi lokal.
- b. Dalam kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah berperan dalam mengembangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun bagi masyarakat sendiri, kemitraan adalah peluang untuk meraih peluang bisnis dan mendapatkan ruang untuk bernegosiasi dengan pemerintah guna mencapai keadilan dan kesetaraan.

Partnership memiliki unsur-unsur penting yang melekat, yaitu (Mohr dan Spekman, 1994 dalam Kurniadi 2020):

1. Komitmen adalah kesediaan mitra untuk berkomitmen dalam hubungan. Hal ini menunjukkan arah masa depan yang berupaya membangun

hubungan di mana masing-masing pasangan dapat mengatasi masalah yang tidak terduga. Komitmen yang tinggi terjadi ketika kedua belah pihak berhasil mencapai tujuan individu bersama tanpa menunjukkan perilaku yang berorientasi pada keuntungan.

2. Koordinasi, suatu kemitraan yang sukses ditandai dengan tindakan terkoordinasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dan bersama.
3. Saling ketergantungan, terbentuknya kemitraan didasarkan pada saling ketergantungan. Kedua belah pihak menyadari bahwa manfaat saling ketergantungan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan bertindak sendiri.
4. Kepercayaan, Kurangnya kepercayaan mengganggu pertukaran informasi, memfasilitasi interaksi, dan mengurangi efektivitas pemecahan masalah bersama.

Menurut pakar Satyanaryama dan Yescombe (Kurniadi, 2020 :29) kerjasama pemerintah dengan swasta harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemitraan, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan hukum dan persyaratan yang ditetapkan memerlukan pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak;
2. Kemanfaatan, yaitu penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta yang mendapatkan beberapa manfaat untuk masyarakat yaitu memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat;

3. Bersaing, pemilihan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan seleksi yang adil, terbuka dan transparan, dengan memperhatikan prinsip persaingan ekonomi yang sehat;
4. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kemitraan dalam penyediaan infrastruktur dapat diimplementasikan melalui suatu manajemen risiko dengan cara penilaian risiko, mitigasi terhadap risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan;
5. Efektif, yaitu suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta mempercepat pembangunan;
6. Efisien, yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur yang bermitra dengan swasta dapat mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

1.6.6 Desa Wisata

Desa wisata merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat (Dewi et al., n.d.,2013). Menurut Fandelin dan Baiquni (2013) menjelaskan pengembangan desa wisata diharapkan dapat mencapai pemerataan intra-wilayah, yang juga disesuaikan dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, melalui keberadaan dan pengembangan desa wisata tersebut. Terdapat juga yang memberi nilai tinggi terhadap produk wisata, seperti nilai budaya suatu desa. (Dedy Rustiono, 2015) Menurut Muliawan dalam Atmoko 2014, desa wisata adalah desa yang berpotensi menjadi daya tarik wisata dilihat dari karakteristik lingkungan alam dan sosial masyarakat desa yang

dikelola dan dikemas secara menarik serta alami yang didukung dengan fasilitas wisata yang ada. Desa wisata yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

1.6.7 Pengembangan Destinasi Wisata Pada Desa Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan proses peningkatan kualitas daya tarik wisata, penyesuaian dan evaluasi untuk menjamin kelestariannya, dan menjadi dasar penetapan kebijakan. Pengembangan pariwisata ini memerlukan dukungan dari sektor lain, mulai dari sektor skala kecil hingga sektor pedesaan. Dalam mengembangkan destinasi ini, hal-hal terkait seperti daya dukung dan masyarakat sekitar harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan wisata disebut juga destinasi pariwisata merupakan daerah yang dapat bersifat administratif maupun tidak. Wilayah tersebut didalamnya mempunyai beberapa daya tarik wisata yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Daerah wisata juga mempunyai jalan yang dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung serta mempunyai keterkaitan dengan masyarakat di sekitarnya. Pengembangan destinasi wisata terdiri dari beberapa aspek atau komponen utama menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) sebagai berikut:

- a. Daya tarik wisata atraksi, aspek tersebut harus dimiliki untuk menjadi suatu daya pikat sehingga dipandang terdapat keunikan maupun daya tarik wisata yang berasal dari alam ataupun buatan manusia;

- b. Aksesibilitas (*Accessibility*), komponen dalam destinasi wisata dengan adanya kemudahan yang menunjang serta dapat diakses mudah menuju ke destinasi wisata;
- c. Amenitas (*Amenities*), dalam destinasi wisata dapat berupa fasilitas umum yang menunjang kebutuhan dari pengunjung yang datang.
- d. Kelembagaan (*Institutions*) merupakan suatu organisasi yang memajemen adanya destinasi wisata seperti mengawasi dan mengatur semua jalannya destinasi wisata.

Pengembangan destinasi wisata mencakup beberapa konsep pengembangan seperti konsep desa wisata, ekowisata, dan pariwisata berbasis komunitas (CBT). Desa wisata yaitu sebuah tempat yang sebagian atau seluruh wilayah desa memiliki potensi dan kegiatannya terangkum dalam suatu produk pengembangan pariwisata yang dikelola secara terus menerus oleh masyarakat desa. Produk tersebut memiliki kriteria sesuai dengan potensi yang ada. Ciri desa wisata seperti terdapat organisasi pendukung pariwisata dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan memiliki wisatawan yang berkunjung pada desa tersebut. (Suryawan et al., n.d., 2017)

1.6.8 *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Pada Desa Wisata

Bentuk kerjasama ada beberapa varian, sebagaimana dikemukakan oleh Ministry of Municipal Affairs (1999) yang mengklasifikasikan jenis kemitraan dalam 10 varian, yaitu:

1. Operasional dan pemeliharaan. Model ini didasarkan pada kontrak penggunaan dan pemeliharaan objek publik antara negara dan perusahaan; (Kurniadi, 2020:30)
2. Perancangan dan pengembangan (*Design Build*). Mengandalkan kontrak negara dan entitas komersial untuk merancang dan mengembangkan fasilitas yang memenuhi standar dan persyaratan kinerja negara. Setelah fasilitas didirikan, pemerintah memiliki dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas tersebut.
3. Pengoperasian (*Turnkey Operation*). Negara menyediakan sarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, namun melibatkan dunia usaha dalam perencanaan, pembangunan, dan penggunaan fasilitas tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah yang memiliki fasilitas menetapkan tujuan.
4. Penambahan ruang yang sudah ada (*Wrap Around Addition*). Divisi bisnis membiayai dan membangun fasilitas tambahan untuk fasilitas yang ada. Selain itu, pedagang dapat menggunakan kesempatan tambahan ini untuk jangka waktu tertentu sampai ia dapat memperoleh kembali investasi dan hasil produksinya;
5. Sewa pembelian. Kontrak pemerintah dengan perusahaan untuk perencanaan, pembiayaan dan pembangunan fasilitas pelayanan publik. Setelah itu, perusahaan menyewakan lahan tersebut kepada negara untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir periode ini, fasilitas tersebut menjadi milik negara. Model ini dapat diterapkan ketika suatu negara membutuhkan suatu fasilitas, namun tidak memiliki cukup uang untuk membangunnya;

6. Privatisasi sementara. Kepemilikan ruang publik yang ada diberikan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan ruang tersebut. Setelah itu, ruangan tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau sampai perusahaan dapat mengembalikan modal dan keuntungan yang ditanamkan;
7. Sewa-Pengembangan - Operasionalisasi (*Lease - Develop - Operate*) atau Beli-Pengembangan Operasionalisasi (*Buy-Develop Operate*). Mitra bisnis menyewa atau membeli *real estate* dari negara, mengembangkan atau memodernisasinya, dan kemudian menggunakannya sesuai kesepakatan dengan pemerintah. Unit usaha diharapkan melakukan investasi dalam pengembangan fasilitas dan diberikan jangka waktu tertentu untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh keuntungan;
8. Pembangunan-Pengalihan Pengoperasian (*Build-Transfer Operate*). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh negara dengan badan komersial untuk pembiayaan dan pembangunan suatu objek, dimana setelah selesainya pembangunan fasilitas tersebut, perusahaan mengalihkan kepemilikan fasilitas tersebut kepada negara. Setelah itu, negara menyewakan kembali lokasi tersebut kepada unit komersial dengan sewa jangka panjang, yang memungkinkan perusahaan mengembalikan investasi dan memperoleh keuntungan;
9. Pembangunan-Kepemilikan-Operate-Transfer (*Build-Own-Operate-Transfer*). Badan usaha diberikan hak eksklusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola dan memungut biaya

waralaba untuk jangka waktu tertentu untuk mengembalikan investasi. Ketika hak waralaba berakhir, kepemilikan kembali ke pemerintah;

10. Pembangunan-Kepemilikan Pengoperasian (*Build-Own Operate*), Pemerintah dapat tanggung jawab dan mengalihkan kepemilikan atas fasilitas yang ada atau mengadakan perjanjian dengan entitas komersial untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun. Pembangunan fasilitas ini dibiayai oleh dunia usaha. Selain itu, model kemitraan juga dipetakan berdasarkan peran masing-masing peserta, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sebagai pengemban mandat pelayanan publik, pemerintah dapat bertindak sebagai penyedia layanan, investor, atau pemasok. Unit bisnis bertindak sebagai investor atau operator. Partisipasi masyarakat juga dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan operasional program kemitraan.

1.6.9 Faktor Keberhasilan *Public Private Partnership*

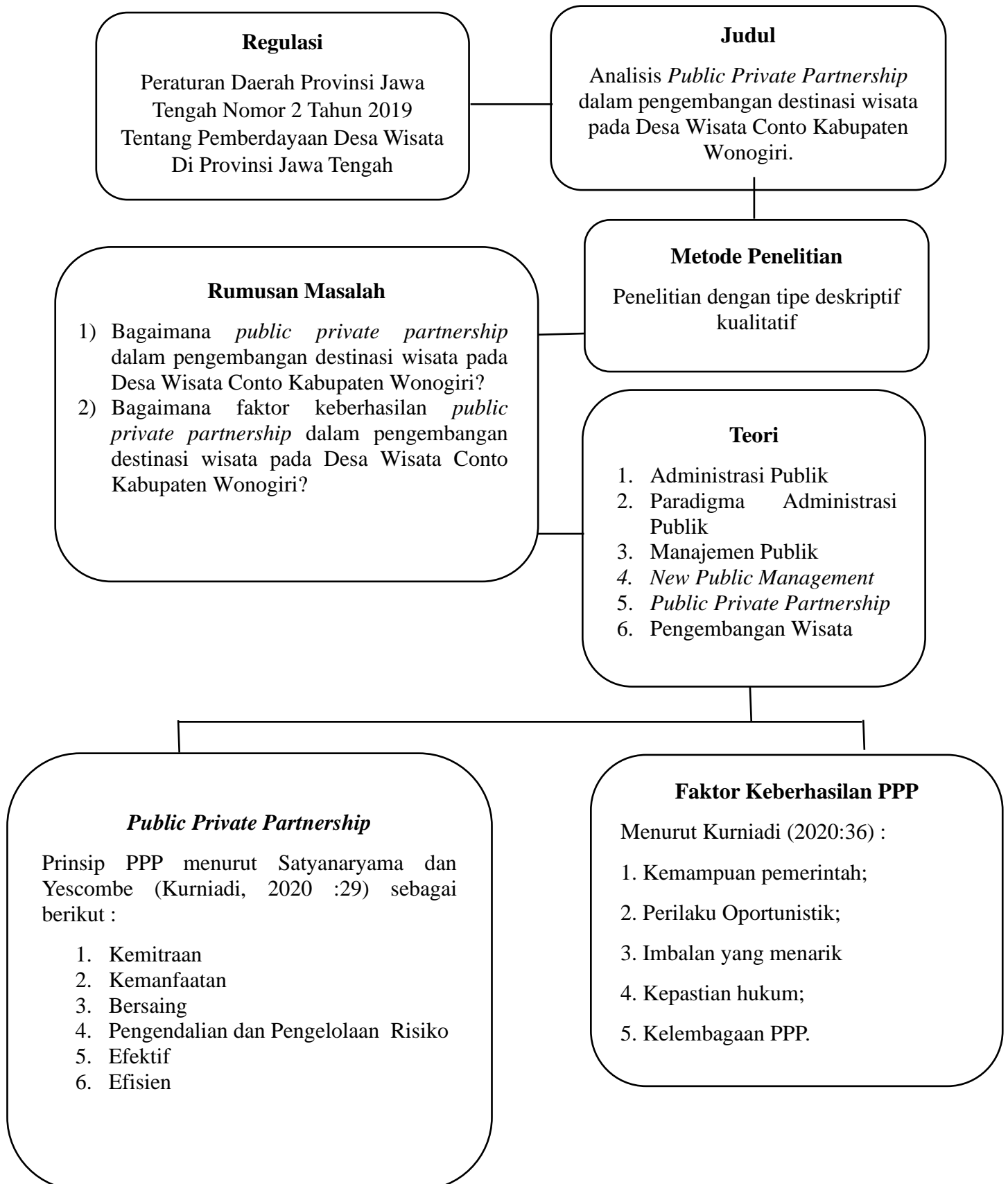
Menurut Kurniadi (2020:36) terdapat faktor-faktor keberhasilan kerjasama atau kemitraan pemerintah dengan swasta. Faktor-faktor keberhasilan tersebut dapat menjadi sebuah pendukung maupun penghambat dari adanya kerjasama pemerintah dengan swasta. Faktor keberhasilan *public private partnership* sebagai berikut:

1. Kemampuan Pemerintah, melihat dari sisi pemerintah atau otoritas publik, bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuannya terkait kerjasama baik dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi dari adanya kerjasama.

2. Perilaku Opportunistik, perilaku tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk mencari keuntungan. Hal ini akan memberikan dampak negatif jika perilaku tersebut dilakukan disalah satu pihak atau kedua - duanya.
3. Imbalan Yang Menarik, bagi pihak swasta suatu reward bisa didapatkan dari adanya investasi pembangunan dan pihak pemerintah juga merasa dibantu untuk memecahkan permasalahan di wilayahnya.
4. Kepastian Hukum, adanya jaminan hukum yang terjadi dalam kerjasama agar mengurangi risiko dikemudian hari jika terdapat konflik antar pihak.
5. Kelembagaan PPP, suatu lembaga yang mendukung adanya kerjasama. Hal ini terkait dengan konsep seperti kerangka delegasi pengelolaan, manajemen aset, manajemen kontrak, isu-isu operasional, dan regulasi yang terkait.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Table 1. 3 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Public Private Partnership

Public Private Partnership dalam pengembangan destinasi wisata diperlukan untuk menambah pendapatan desa seperti pada Desa Wisata Conto. Prinsip *Public Private Partnership* dalam penerapannya terdiri dari:

1. Kemitraan, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan hukum dan persyaratan yang ditetapkan memerlukan pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak. Dalam kemitraan sebuah landasan hukum yang mengatur kedua belah pihak sangat diperlukan sebagai fondasi kuat dalam melaksanakan kerjasama. Pada penelitian ini prinsip kemitraan pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dilihat dari adanya ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan kedua belah pihak yang menerapkan kemitraan.
2. Kemanfaatan, yaitu penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta yang mendapatkan beberapa manfaat untuk masyarakat yaitu memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Adanya kemitraan tidak akan terlepas pada tujuan yang hendak dicapai yang menghasilkan manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk pemerintah, dan swasta. Prinsip kedua dalam kemitraan pemerintah dengan swasta yaitu kemanfaatan. Dalam penelitian ini terkait dengan prinsip kemanfaatan pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan

destinasi wisata pada Desa Wisata Conto melihat dari adanya penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terdapat manfaat kemitraan bagi masyarakat desa.

3. Bersaing, pemilihan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan seleksi yang adil, terbuka dan transparan, dengan memperhatikan prinsip persaingan ekonomi yang sehat. Prinsip bersaing dalam penelitian ini yang terdapat pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dilihat dari pengadaan mitra melalui beberapa tahapan pemilihan kemitraan apakah menerapkan kesetaraan dan transparansi dalam tahapannya.
4. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kemitraan dalam penyediaan infrastruktur dapat diimplementasikan melalui suatu manajemen risiko dengan cara penilaian risiko, mitigasi terhadap risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan. Sebuah risiko dalam kemitraan perlu adanya pengelolaan agar tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Pada prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko dalam *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto mengamati pada aspek pengendalian risiko yang dilakukan dalam bentuk mitigasi dan aspek pengelolaan risiko yang dilihat dari tahapan pengelolaan risiko.
5. Efektif, yaitu suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pengelolaan dan pemeliharaan

infrastruktur serta mempercepat pembangunan. Efektif dalam kemitraan yaitu apa yang dilakukan tepat guna. Pada penelitian ini prinsip efektif pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dilihat dari adanya kejelasan program sesuai tujuan kerjasama dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Efisien, yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur yang bermitra dengan swasta dapat mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Aspek yang diamati dalam prinsip efisien pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto yaitu optimalisasi sumber daya dan penilaian kinerja yang teratur pada pelaksanaan kemitraan.

1.8.2 Faktor Keberhasilan *Public Private Partnership*

Terdapat faktor-faktor keberhasilan kerjasama atau kemitraan pemerintah dengan swasta. Faktor-faktor keberhasilan tersebut dapat menjadi sebuah faktor pendukung maupun faktor penghambat dari adanya kerjasama pemerintah dengan swasta terkait dengan pengembangan destinasi wisata pada desa wisata. Faktor keberhasilan *Public Private Partnership* sebagai berikut :

1. Kemampuan Pemerintah, melihat dari sisi pemerintah atau otoritas publik, bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuannya terkait kerjasama baik dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi dari adanya kerjasama. Kemampuan pemerintah merupakan salah satu faktor

kesuksesan adanya kemitraan. Pada penelitian ini, salah satu faktor keberhasilan yaitu kemampuan pemerintah pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dilihat dari adanya kepemimpinan yang baik dan kemampuan negosiasi yang dilaksanakan pihak pemerintah kepada swasta.

2. Perilaku Opportunistik, perilaku tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk mencari keuntungan. Hal ini akan memberikan dampak negatif jika perilaku tersebut dilakukan disalah satu pihak atau kedua duanya. Faktor keberhasilan yakni perilaku opportunistik pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto mengamati pada pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan adanya sifat ketidakadilan dalam implementasi kerjasama dari kedua pihak terkait.
3. Imbalan Yang Menarik, bagi pihak swasta suatu reward bisa didapatkan dari adanya investasi pembangunan dan pihak pemerintah juga merasa dibantu untuk memecahkan permasalahan di wilayahnya. Imbalan dapat menjadikan faktor keberhasilan dilakukannya kerjasama. Faktor keberhasilan yakni imbalan yang menarik dalam penelitian ini yang terdapat pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dilihat dari bentuk imbalan yang ada dalam kemitraan dan jenis imbalan yang terdapat dalam pelaksanaan kemitraan.

4. Kepastian Hukum, adanya jaminan hukum yang terjadi dalam kerjasama agar mengurangi risiko dikemudian hari jika terdapat konflik antar pihak. Aspek hukum dalam kemitraan dapat mengurangi risiko dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan antar pihak. Sehingga dengan peningkatan kepercayaan dalam kerjasama dinilai sukses dalam melakukan kerjasama. Faktor keberhasilan yakni kepastian hukum pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto mengamati pada aspek legalitas hukum atas status kerjasama pemerintah desa dengan swasta.
5. Kelembagaan PPP, suatu lembaga yang mendukung adanya kerjasama. Hal ini berkaitan dengan aspek seperti kerangka delegasi pengelolaan, manajemen aset, manajemen kontrak, isu-isu operasional, dan regulasi yang terkait. Faktor keberhasilan yaitu kelembagaan PPP dalam penelitian ini melihat aspek adanya struktur lembaga yang terbentuk untuk mendukung kerjasama, manajemen aset dan manajemen kontrak dalam kemitraan.

1.9 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian merupakan penjelasan dari apa yang akan diperdalam peneliti yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang ada dilapangan yang merupakan objek penelitian. Tujuan suatu fenomena penelitian untuk mempermudah peneliti dalam rangkaian pemikiran serta penyesuaian terhadap teori yang telah dijelaskan oleh peneliti. Penelitian ini mempunyai fenomena dan petunjuk yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
1.	Prinsip PPP	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemitraan - Adanya kebutuhan kedua belah pihak untuk bermitra
		Kemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penyediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha dalam kerjasama - Adanya manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta dengan adanya kerjasama
		Bersaing	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengadaan mitra melalui beberapa tahapan pemilihan dalam kemitraan
		Pengendalian dan pengelolaan risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengendalian risiko dalam kerjasama dilihat dari bentuk mitigasi - Terdapat pengelolaan risiko dalam kerjasama melalui tahapan pengelolaan risiko
		Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kejelasan program sesuai tujuan kerjasama - Adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dalam kemitraan
		Efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat optimalisasi sumber daya dengan adanya kemitraan - Adanya penilaian kinerja yang teratur pada pelaksanaan kemitraan
2.	Faktor Keberhasilan PPP	Kemampuan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kepemimpinan yang baik sehingga dapat membentuk kerjasama - Adanya kemampuan negosiasi pemerintah kepada mitra dalam kerjasama

	Perilaku Oportunistik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama - Adanya sifat ketidakadilan dalam implementasi kerjasama
	Imbalan yang menarik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya bentuk reward dalam kemitraan - Adanya jenis reward dalam kemitraan
	Kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat legalitas hukum atas status kerjasama
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat struktur lembaga yang terbentuk untuk mendukung kerjasama - manajemen aset dalam kemitraan yang dilakukan - manajemen kontrak dalam kemitraan yang dilakukan

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan memperoleh data yang bentuk tulisan maupun lisan (tidak menggunakan angka atau statistika) dimana data-data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi ataupun studi literatur. Selanjutnya penelitian ini nantinya memakai jenis penelitian kasus yaitu terkait dengan permasalahan pengembangan potensi menjadi destinasi wisata pada Desa Wisata Conto, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu penganut aliran fenomenologi, yang berfokus pada penelitian ilmiah yang menggambarkan

dan memahami fenomena sosial yang diamati. Pemahaman tidak hanya dari sudut pandang peneliti saja, namun yang lebih penting adalah memahami fenomena dan fakta yang diamati dari sudut pandang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melaporkan secara sistematis dan akurat gejala, fakta atau peristiwa tentang karakteristik suatu populasi atau wilayah. Penelitian deskriptif biasanya tidak memerlukan pencarian atau penjelasan hubungan dan pengujian hipotesis.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan salah satu tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokus penelitian di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri merupakan sebuah daerah yang berkembang serta pendapatan daerah yang tidak tinggi. Pada daerah Kabupaten Wonogiri memiliki potensi wisata alam dan budaya sehingga pemerintah mengembangkan pariwisata di Wonogiri melalui desa wisata. Salah satu desa wisata yang mendapatkan penghargaan ADWI Tahun 2023 yaitu Desa Wisata Conto. Pada Desa Wisata Conto terdapat kerjasama pihak swasta dengan pemerintah terkait pengembangan destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan. Sehingga peneliti mengambil lokus Desa Wisata Conto.

Fokus penelitian merupakan pembatasan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan

adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada penjelasan dan analisis *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto. Selain itu, fokus penelitian juga terdapat pada faktor penghambat dan pendorong adanya PPP dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto.

1.10.3 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2013:132), subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang informasi yang diinginkan peneliti sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang dapat berupa data angka atau kalimat. Informasi tersebut dapat berupa fakta latar belakang dan keadaan penelitian. Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Menurut Creswell (2012:16), terdapat enam ciri penelitian kualitatif, yang pertama adalah menyelidiki masalah dan mengembangkan pemahaman rinci tentang topik utama. Yang kedua adalah tinjauan literatur, yang memainkan peran kecil namun memberikan justifikasi atas permasalahan yang ada. Ketiga, tujuan dan pertanyaan penelitian didefinisikan secara umum dan luas mengenai pengalaman partisipan. Fungsi keempat adalah mengumpulkan perkataan atau pernyataan sekelompok kecil maupun beberapa orang untuk mengetahui pendapat peserta. Kelima, analisis data untuk deskripsi dan tema dengan menggunakan analisis tekstual dan menafsirkan makna temuan yang lebih luas. Ciri terakhir yaitu menulis laporan menggunakan

konstruksi dan kriteria evaluasi yang terus berkembang dan fleksibel, termasuk efektivitas dan bias subjektif. Dalam penelitian ini, terdapat subjek penelitian yaitu Pemerintah Desa Conto, Pokdarwis Desa Conto, Pihak swasta CV. Ambar Sari, dan masyarakat setempat.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut ahli Sugiyono (2017:193), ada beberapa jenis data yaitu data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka atau besaran. Jadi data tersebut dihitung dan disimbolkan dalam bentuk pengukuran tertentu. Dan ada data kualitatif yang hakikatnya adalah pernyataan, dimana jenis datanya dikaitkan dengan nilai kualitatif, misalnya sangat baik, baik, sedang, baik, cukup, kurang baik, dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal dan bukan numerik. Data kualitatif yang dimasukkan dalam penelitian ini merupakan gambaran umum mengenai objek penelitian. (Rita Fiantika et al., 2022)

b. Sumber Data

a) Data Primer

Menurut Sugiyono (2015), data primer ialah jenis data yang diambil secara langsung. Cara pengumpulan data pada data primer dapat dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Penelitian *public private partnership* ini, penulis menggunakan pengumpulan data primer melalui

wawancara dan observasi. Data tersebut diperoleh dari responden dan dikumpulkan untuk disajikan dalam penelitian analisis *public private partnership*.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:137), data sekunder merupakan jenis data yang diambil secara tidak langsung, contoh mendapatkan data dari orang lain, koran, media sosial, jurnal, dan masih banyak lagi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara dari informan yaitu pihak yang terkait kerjasama, pengelola desa wisata, dan masyarakat. Selain melalui wawancara, data primer juga didapat dari observasi di lapangan secara langsung.

Data sekunder dalam penelitian ini, diambil melalui artikel jurnal terkait dengan analisis *public private partnership*, media sosial dari pemerintah setempat atau *website* pemdes setempat serta pihak swasta terkait. Selain itu, peneliti menggunakan dokumen Perpres No 38 Tahun 2015 terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Sedangkan untuk teori menggunakan buku terkait *public private partnership* dan implementasi kebijakan. Data sekunder juga diperoleh dari RPJMDes tahun 2020-2025 dan laporan capaian kerja pemerintah Desa Conto. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari media sosial Instagram Goa Resi dan Desa Wisata Conto.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sukmadinata (2005), observasi (*observation*) adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan informasi dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Sugiyono menyatakan observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dengan cara melihat secara langsung terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini akan dilaksanakan secara observasi langsung ke lingkungan Desa Wisata dengan destinasi yang dikembang oleh swasta. Selain itu, observasi dilakukan melalui keikutsertaan rapat umum terkait laporan hasil pendapatan desa pada tiap bulannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan langsung antara dua orang atau lebih atau percakapan dengan tujuan tertentu. Ada dua pihak dalam percakapan, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Tujuan wawancara yang disoroti oleh Lincoln dan Guba (Rita Fiantika et al., 2022) antara lain: membangun orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keprihatinan, dll. Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk penelitian dan memperoleh informasi

langsung atau primer dari pemangku kepentingan atau partisipan yang mempunyai peran dalam topik penelitian. Untuk itu peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditulis secara sistematis mengenai bagaimana *public private partnership* dan faktor dalam *public private partnership* terkait pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata document yang berarti benda tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan informasi atau data dengan mencatat informasi yang ada. Metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh melalui dokumen. Keunggulan dokumentasi adalah harganya yang relatif murah, waktu dan tenaga yang lebih efisien. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya untuk mendapatkan sebuah data sekunder. Peneliti membutuhkan dokumen foto terkait implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta Tahun 2023 melalui rapat koordinasi atau kerjasama antar pihak, dokumentasi foto wawancara tahun 2023, maupun rekaman wawancara saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak aktor yang bersangkutan terutama pada tempat di destinasi yang dikembangkan.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Suatu analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles, Huberman, dan Saldana dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah

(1) Reduksi Data (*data reduction*);

Reduksi data adalah bagian analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak perlu dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara melalui seleksi yang ketat. Menggunakan ringkasan atau deskripsi singkat, mengelompokkannya ke dalam pola yang lebih besar, dll. Penelitian ini melakukan analisis dan penggolongan data serta hasil kesimpulan data melalui data sekunder dan data primer terkait dengan *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto.

(2) Penyajian Data (*data display*);

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Dengan menampilkan data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya. Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan atau

flowcard terkait *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto. Sehingga peneliti akan lebih mudah menjelaskan mengenai hal yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

(3) Penarikan Kesimpulan.

Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan terakhir dalam suatu analisis data. (Rita Fiantika et al., 2022) Penarikan kesimpulan merupakan penelaah data data yang sudah diperoleh. Penarikan kesimpulan akan berguna untuk menjelaskan terkait dengan hasil penelitian. Sehingga pada penelitian ini penarikan kesimpulan terkait dengan analisis *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto.

1.10.7 Kualitas Data dan Validitas Data

Dalam penelitian memerlukan sebuah kualitas data dan kevalidan data. Menurut Sugiyono (2017: 267), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas data sangat diperlukan di dalam suatu penelitian, karena validitas ini dapat dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam mengetahui validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik untuk pengecekan data dari berbagai sumber, cara

serta waktu (Sugiyono, 2017: 273). Adapun macam triangulasi menurut Sugiyono antara lain:

a) Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan atau informasi yang diperoleh.

b) Triangulasi Teknik

Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

c) Triangulasi waktu

Suatu metode untuk memeriksa keandalan data dari beberapa sumber dengan batas waktu atau dalam jangka waktu tertentu.

Validitas atau keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti memeriksa keabsahan sumber dari hasil informan yang berbeda-beda, karena untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya diperlukan informan yang berbeda-beda, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari satu sudut pandang saja. fenomena penyelidikan yang diberikan dapat diamati dari sudut pandang lain.